

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan dokumen penting dalam dunia bisnis karena dapat menunjukkan kinerja, posisi, dan arus keuangan suatu perusahaan. Selain itu, laporan keuangan juga dapat digunakan oleh berbagai pihak seperti pemilik, manajemen, karyawan, kreditur, investor, pemerintah, atau masyarakat, untuk menilai kesehatan keuangan suatu perusahaan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan laporan keuangan sebagai suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (IAI, 2015). Pelaporan keuangan yang akurat dan transparan merupakan pondasi penting bagi kepercayaan investor dan stabilitas pasar modal yang berguna dalam proses pengambilan keputusan ekonomi baik bagi pihak internal maupun eksternal. Hal ini menyebabkan keinginan perusahaan untuk menyajikan informasi sebegus mungkin untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan penggunanya. Namun, kasus-kasus kecurangan pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuaskan terjadi dalam beberapa dekade terakhir telah mengguncang kepercayaan publik terhadap integritas laporan keuangan perusahaan. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada perusahaan yang terlibat, tetapi juga mempengaruhi keseluruhan ekosistem pasar modal, termasuk di Indonesia.

Kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan biasa disebut *fraud*. Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), *fraud* adalah “Penggunaan profesi seseorang untuk menambahkan kekayaan pribadi melalui penyalahgunaan yang disengaja atau penyalahgunaan sumber daya atau aset organisasi.” *Fraud* juga didefinisikan sebagai tindakan penipuan atau kecurangan dalam aktivitas bisnis yang melibatkan transaksi keuangan. Umumnya *fraud* yang terjadi pada perusahaan yaitu kecurangan pelaporan keuangan atau yang dikenal *Fraudulent Financial Reporting*.

Dalam satu dekade terakhir, terdapat banyak bukti terkait kecurangan dalam pelaporan keuangan. Di antara kasus yang paling terkenal adalah skandal yang melibatkan perusahaan Enron dan WorldCom. Skandal Enron merupakan salah satu kasus *fraud* laporan keuangan terbesar dalam sejarah, yang menunjukkan bagaimana manipulasi akuntansi dapat menghancurkan perusahaan dan merugikan banyak pihak. Enron menggunakan teknik *mark-to-market accounting* untuk mencatat keuntungan yang belum direalisasikan seolah-olah telah diperoleh, serta menyembunyikan kerugian melalui *Special Purpose Entities* (SPE) yang dikendalikan oleh eksekutifnya sendiri. Praktik ini menciptakan laporan keuangan yang menyesatkan, membuat perusahaan tampak sangat menguntungkan padahal sebenarnya mengalami kesulitan keuangan (Bondarenko. P, 2025).

Selain Enron, kasus kecurangan tentang pelaporan laporan keuangan yang cukup besar terjadi pada perusahaan Worldcom. Kasus *Fraud* Laporan Keuangan WorldCom. Perusahaan telekomunikasi raksasa ini melakukan kecurangan dengan mengklasifikasikan biaya operasional sebagai pengeluaran modal, sehingga

menciptakan kesan laba yang lebih besar dari kenyataan. Praktik ini dilakukan di bawah arahan CEO Bernard Ebbers dan CFO Scott Sullivan, yang berusaha mempertahankan harga saham WorldCom di tengah perlambatan pertumbuhan pendapatan. Dampak besar dari kasus ini mendorong lahirnya Undang-Undang *Sarbanes-Oxley* (2002) untuk memperketat regulasi dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan. Skandal ini menjadi bukti nyata bagaimana *fraud* dalam laporan keuangan dapat merusak kepercayaan publik dan menimbulkan konsekuensi hukum yang serius.

Berdasarkan laporan *Report to the Nation* yang dirilis oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) tahun 2016, 2018, 2020, dan 2022, kecurangan laporan keuangan (*financial statement fraud*) merupakan kecurangan yang paling jarang terjadi namun memiliki dampak kerugian yang paling besar jika dibandingkan dengan kecurangan pada korupsi dan penyalahgunaan aset. Adapun data tersebut disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Kerugian *Fraud*

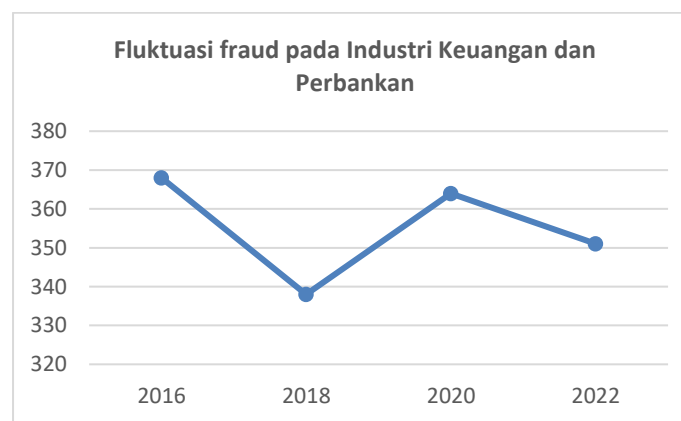
Tahun	Penyalahgunaan Aset	Korupsi	Kecurangan Pelaporan Keuangan
2016	\$125,000	\$200,000	\$975,000
2018	\$114,000	\$250,000	\$800,000
2020	\$100,000	\$200,000	\$954,000
2022	\$100,000	\$150,000	\$543,000

Sumber: *ACFE Report To The Nations* 2016, 2018, 2020, 2022 (data diolah, 2025)

Berdasarkan data dari tabel tersebut, kerugian akibat *fraud* yang tercatat pada tahun 2016 sebanyak \$975,000 (ACFE, 2016). Pada tahun 2018 tercatat

sebanyak \$800,000 (ACFE, 2018). Tahun 2020 tercatat sebanyak \$954,000 (ACFE, 2020). Adapun tahun 2022 tercatat sebanyak \$543,000 (ACFE, 2022). Data ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan mekanisme pengawasan dan pencegahan kecurangan, terutama dalam aspek pelaporan keuangan untuk mengurangi dampak kerugian yang dapat merugikan organisasi secara material.

Selain data kerugian *fraud*, terdapat data mengenai fluktuasi *fraud* pada industri keuangan dan perbankan. Data tersebut disajikan pada gambar berikut ini:



Sumber: ACFE Report To The Nations 2016, 2018, 2020, 2022 (data diolah, 2025)

Gambar 1.1

Fluktuasi *fraud* pada Industri Keuangan dan Perbankan

Fluktuasi *fraud* dalam industri keuangan dan perbankan menunjukkan pola yang dinamis selama periode 2016 hingga 2022, dengan jumlah kasus yang naik turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, tercatat sebanyak 368 kasus *fraud*, menjadi angka tertinggi dalam periode yang dianalisis. Namun, angka ini menurun cukup signifikan pada tahun 2018, menjadi 338 kasus menunjukkan adanya kemungkinan perbaikan dalam pengendalian dan mitigasi risiko *fraud* di sektor ini. Sayangnya, penurunan tersebut tidak bertahan lama. Pada tahun 2020, jumlah kasus *fraud* kembali meningkat menjadi 364 kasus. Kenaikan ini dapat dipengaruhi oleh

berbagai faktor, seperti perubahan dinamika ekonomi, tekanan akibat pandemi COVID-19, atau lemahnya pengawasan terhadap praktik keuangan. Selanjutnya, pada tahun 2022, jumlah kasus *fraud* sedikit menurun menjadi 351 kasus. Maraknya kasus *fraud* terutama di sektor keuangan dan perbankan yang cenderung masih cukup sulit untuk diungkapkan ini melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Secara keseluruhan, data tersebut menggambarkan bahwa *fraud* dalam industri keuangan dan perbankan tidak hanya bersifat fluktuatif, tetapi juga konsisten menjadi ancaman serius. Perubahan jumlah kasus dari tahun ke tahun mencerminkan perlunya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan pengawasan, transparansi, dan pengendalian risiko untuk meminimalkan peluang terjadinya kecurangan. Di Indonesia, beberapa kasus kecurangan telah mencuat di industri ini, dimana perusahaan diduga melakukan manipulasi data keuangan untuk mempertahankan citra keuangan yang baik dimata investor dan regulator. Hal ini tidak hanya merugikan investor tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan dan perbankan secara keseluruhan.

Fenomena kasus kecurangan laporan keuangan pada perbankan dapat terjadi mulai dari teller hingga direksi. PT Bank Mandiri Tbk menyadari bahwa setiap kegiatan usaha perbankan dapat menghadapi resiko operasional, salah satunya berasal dari kecurangan atau perbuatan curang dari internal bank. Untuk mencegah praktik kecurangan, komisaris dan direksi Bank Mandiri terlibat aktif dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas resiko sesuai regulator. Pengelolaan pengendalian risiko aturan dan kecurangan secara proaktif menjadi

tanggung jawab semua lini dalam kerangka prinsip pertahanan tiga lapis (Hutauruk, D & Mahadi, 2022).

Contoh kasus yang pernah terjadi di perusahaan perbankan di Indonesia meliputi kasus dana nasabah PT. Maybank Indonesia Tbk. (BNII) yang mengalami pembobolan dana di rekening pribadinya sebesar Rp. 22 miliar pada tahun 2020. Kejadian tersebut telah dilaporkan oleh pihak yang bersangkutan serta dikonfirmasi oleh Juru Bicara OJK, Sekar Putih Djarot telah dilaporkan ke Bareskrim Polda Metro Jaya. Kepala Cabang Maybank Cipulir melakukan pembobolan pada dana nasabah yang bernama Winda Lunardi dan ibu nya yaitu Fioletta Lizzy Wiguna dana tersebut digunakan secara tidak sah yang pada akhirnya PT. Maybank Indonesia Tbk. (BNII) tidak bisa mengembalikan dana yang hilang tersebut (Sidik, 2020). Pembobolan dana ini bisa terjadi dikarenakan tersangka memiliki semua akses yang berkaitan dengan Winda Lunardi dan juga menerapkan praktek *shadow banking*, praktek *shadow banking* adalah aktivitas keuangan yang dilakukan di luar sektor perbankan tradisional, tetapi memiliki fungsi yang mirip dengan perbankan konvensional. Hal ini bisa diketahui karena hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian menyatakan bahwa dana dari rekening Winda Lunardi sempat dialirkan kepada orang lain (Septiadi, A & Laoli, 2020).

Dalam kasus perbankan, teller Bank Rakyat Indonesia (BRI) diamankan oleh Dirkrimsus Polda Sulsel pada Januari 2019 lantaran menilap dana 47 nasabah BRI di Makassar senilai lebih dari Rp 2,3 miliar. Aksi ini dilakukan sejak April 2018 dengan modus menggandakan slip penyetoran dan penarikan lalu memalsukan tanda tangan dari nasabah. Kemudian mencetak buku tabungan dengan menggunakan

program *microsoft excel*. Misalkan nasabah menyetor uang Rp 10 juta ke BRI, slip penyetoran tetap sama nominal nya. Namun slip laporan yang di masukkan ke BRI itu diubah menjadi Rp 5 juta. Slip hasil laporan ke nasabah itu sesuai, tapi laporan ke bank tidak sesuai. Jadi ada dua slip penyetoran yang dibuat (Hariyadi & Cahyani, 2019). Kasus ini menunjukkan bahwa *control activities* bank masih lemah, sehingga perlu adanya evaluasi terkait pelaksanaan pengendalian internal untuk memperkecil kesempatan kecurangan (Munsir, 2019).

Kasus *fraud* juga terjadi pada tahun 2012 di PT. Bank Central Asia Tbk KCU melibatkan indikasi kecurangan dalam proses pembiayaan komersial, seperti pembelian alat berat. Internal audit menemukan bahwa prosedur kredit tidak dijalankan sesuai standar, mulai dari analisis permohonan hingga realisasi kredit. Debitur PT. Four Eye Principle mengajukan kredit dengan dokumen lengkap, namun prosesnya diwarnai pemberian uang pelicin kepada pejabat bank yang memengaruhi keputusan realisasi kredit. Pencairan kredit dilakukan tanpa analisis mendalam terhadap kemampuan pembayaran debitur, sehingga kredit macet terjadi. Kegagalan debitur melunasi kredit dan bunga memperburuk kerugian bagi Bank Central Asia. Kasus ini menunjukkan lemahnya manajemen risiko bank dan pengawasan internal, serta kurangnya upaya debitur mencari solusi finansial meskipun perusahaan menghadapi kebangkrutan (Rahmawati, R).

Kasus dan dugaan kecurangan dalam laporan keuangan memperlihatkan perlunya menganalisis laporan keuangan secara cermat. Teori *fraud pentagon* merupakan teori yang dikemukakan oleh Crowe Horwarth (2011), teori ini merupakan pengembangan dari teori-teori sebelumnya yaitu Teori *Fraud Triangle*

dan Teori *Fraud Diamond*. Dalam Teori *Fraud Pentagon* menjelaskan perilaku *fraud* yang didukung oleh 5 elemen yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, kompetensi, dan arogansi. Masing-masing elemen ini memiliki proksi didalamnya yang dijadikan faktor untuk mengukur elemen pada penelitian ini.

Proksi pertama dari elemen tekanan yaitu target keuangan berupa laba yang harus dicapai suatu entitas dalam suatu periode, alat ukur dalam menghitung target keuangan ini menggunakan rasio ROA. ROA merupakan salah satu metode untuk mengukur perkembangan laba perusahaan. Umumnya tekanan ini muncul karena adanya kebutuhan, namun banyak juga yang terdorong karena sifat serakah. Hasil penelitian Agusputri & Sofie (2019) menunjukkan bahwa target keuangan berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Sedangkan, hasil dari penelitian Fidyah dan Yini (2018) target keuangan tidak berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

Proksi kedua dari elemen peluang yaitu pengawasan tidak efektif, yaitu tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak manajemen. Variabel ini menghitung pengawasan tidak efektif dengan rasio IND yaitu perbandingan jumlah komisaris independen dengan jumlah dewan komisarisnya. Penggunaan rasio ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengawasan suatu perusahaan. Apabila suatu perusahaan memiliki dewan komisaris independen lebih dari satu, maka semakin besar tingkat pengawasan suatu perusahaan sehingga praktik *fraud* dapat diminimalisirkan. Peluang akan terbuka akibat dua hal, yang pertama yaitu mengetahui tentang seluk beluk perusahaan mulai dari sistem, operasional bahkan kelemahan perusahaan dan kedua yaitu lemahnya fungsi pengendalian perusahaan.

Jika seorang yang melakukan kecurangan melihat suatu kesempatan atau peluang untuk melakukan *fraud*, maka hal ini akan memungkinkan untuk dia melakukan hal tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Riandani & Rahmawati (2019) dan Agustina & Pratomo (2019) telah melakukan penelitian yang membuahkan hasil bahwa pengawasan tidak efektif berpengaruh positif terhadap *fraudulent financial reporting*.

Proksi ketiga dari elemen rasionalisasi yaitu total akrual. Nilai akrual dalam perusahaan ditentukan oleh keputusan manajemen yang dapat mendorong manajemen untuk merasionalisasi cara mereka memandang dan mengelola pencatatan laporan keuangan (Octaviana, 2022). Dengan memanipulasi laba melalui pemanfaatan prinsip akrual, yaitu dengan mengakui pendapatan yang akan datang lebih awal, maka ketika rasio total akrual semakin tinggi hal itu bisa diindikasikan adanya potensi kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan (Hadi et al., 2021). Menurut Tuanakotta (2010) rasionalisasi diartikan sebagai pembenaran sikap yang akan diambil sebelum melakukan tindakan kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumosari & Solikhah (2020) dan Hadi et al., (2021) terbukti bahwa rasio total akrual dengan menggunakan indikator pengukuran rasio total akrual memiliki pengaruh pada kecurangan pelaporan keuangan.

Proksi keempat dari elemen kompetensi yaitu pergantian direksi. Pergantian direksi adalah penyerahan wewenang dari direksi lama ke direksi baru. Hal ini bertujuan untuk memperbaiki kinerja manajemen sebelumnya. Pergantian direksi dapat menimbulkan *stress period* sehingga berdampak pada semakin adanya kecurangan. Hal ini disebabkan oleh dampak negatif dari *stress period* yang dapat

mengurangi kinerja perusahaan karena waktu yang dibutuhkan oleh direksi baru untuk beradaptasi (Sasongko & Wijyantika, 2019). Hasil penelitian Dewi & Yulianti (2022) dan Octaviani et al., (2021) menemukan bahwa perubahan direksi yang diproksikan dengan tingkat pergantian direktur utama berpengaruh positif terhadap kecurangan.

Proksi kelima dari elemen arogansi yaitu frekuensi kemunculan foto CEO. Banyaknya frekuensi kemunculan foto CEO yang terpampang pada laporan keuangan tahunan perusahaan dapat mempresentasikan tingkat superioritas atau arogansi dari CEO (Ismawati et al., 2019). frekuensi kemunculan foto CEO dapat diukur dengan melihat total foto CEO yang terpampang dalam laporan keuangan tahunan (CEOPIC) (Nurmulina & Sasongko, 2018). Arogansi merupakan sikap sombong atau angkuh yang menganggap dirinya mampu melakukan kecurangan. Sifat ini akan memicu timbulnya keyakinan bahwa dirinya tidak akan diketahui apabila kecurangan telah terjadi dan sanksi yang ada tidak dapat menimpa dirinya. Hasil dari penelitian Apriliana & Agustina (2017) serta Yessi (2018) menunjukkan bahwa frekuensi kemunculan foto CEO memiliki pengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan. Namun, dalam penelitian Quraini & Rimawati (2018) dan Ufiana & Triyanto (2022) menunjukkan hasil bahwa frekuensi kemunculan foto CEO tidak pengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

Fenomena ini menggarisbawahi perlunya studi lebih lanjut untuk memahami bagaimana target keuangan, pengawasan tidak efektif, total akrual, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan foto CEO memengaruhi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) periode 2016-2023. Dengan menganalisis pengaruh dari target keuangan, pengawasan tidak efektif, total akrual, pergantian direksi, dan frekuensi kemunculan foto CEO diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya pencegahan dan deteksi dini *fraud* dalam laporan keuangan, sehingga meningkatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap industri perbankan di Indonesia.

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Irfan (2022) dan Agustin (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel penelitian, objek penelitian, tahun penelitian dan metode penelitian. Pemilihan sektor perbankan yang terdaftar di BEI periode 2016 - 2023 sebagai objek penelitian didasarkan karena banyaknya kasus kecurangan yang terjadi pada perusahaan perbankan dan juga merupakan salah satu sektor perusahaan yang berkontribusi besar terhadap perekonomian di Indonesia sehingga diperlukan usaha dalam meminimalisir terjadinya ketidakselarasan informasi perusahaan yang menimbulkan tindakan manajemen laba yang merupakan salah satu penyebab terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Perbankan merupakan sektor bisnis yang *highly regulated* dengan pergerakannya diatur oleh otoritas moneter (Meyerhof Salama & Braga, 2023).

Selain itu, penelitian ini menggunakan teori *fraud pentagon* sebagai pendekatan utama, karena teori *fraud pentagon* merupakan penyempurnaan dari teori *fraud triangle* dan teori *fraud diamond* (Putra, Y.P, 2022). Teori *fraud pentagon* masih relevan dengan kondisi kasus *fraud* pada zaman sekarang dan merupakan upgrade dari teori-teori sebelumnya yakni *fraud triangle theory* dan

fraud diamond theory yang digunakan oleh penelitian terdahulu (Triyono.T, 2022).

Berdasarkan latar belakang masalah dan *research gap* yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pada kecurangan pelaporan keuangan menggunakan teori *fraud pentagon* dengan mengambil judul **“PENGARUH TARGET KEUANGAN, PENGAWASAN TIDAK EFEKTIF, TOTAL AKRUAL, PERGANTIAN DIREKSI, DAN FREKUENSI KEMUNCULAN FOTO CEO TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2023”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas diatas, maka peneliti membuat identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Target Keuangan, Pengawasan Tidak Efektif, Total Akrua, Pergantian Direksi, dan Frekuensi Kemunculan Foto CEO dan Kecurangan pelaporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2023.
2. Bagaimana pengaruh Target Keuangan, Pengawasan Tidak Efektif, Total Akrua, Pergantian Direksi, dan Frekuensi Kemunculan Foto CEO secara parsial terhadap Kecurangan pelaporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2023.
3. Bagaimana pengaruh Target Keuangan, Pengawasan Tidak Efektif, Total Akrua, Pergantian Direksi, dan Frekuensi Kemunculan Foto CEO secara simultan terhadap Kecurangan pelaporan keuangan perusahaan perbankan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2023.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Target Keuangan, Pengawasan Tidak Efektif, Total Akrua, Pergantian Direksi, dan Frekuensi Kemunculan Foto CEO dan Kecurangan pelaporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2023.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Target Keuangan, Pengawasan Tidak Efektif, Total Akrua, Pergantian Direksi, dan Frekuensi Kemunculan Foto CEO secara parsial terhadap Kecurangan pelaporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2023.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Target Keuangan, Pengawasan Tidak Efektif, Total Akrua, Pergantian Direksi, dan Frekuensi Kemunculan Foto CEO secara simultan terhadap Kecurangan pelaporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2023.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis dalam bidang ilmu ekonomi khususnya akuntansi dan memberikan gambaran mengenai Target Keuangan, Pengawasan Tidak Efektif, Total Akrual, Pergantian Direksi, dan Frekuensi Kemunculan Foto CEO terhadap kecurangan pelaporan keuangan.

2. Bagi pihak lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah wawasan serta tambahan referensi mengenai pengaruh Target Keuangan, Pengawasan Tidak Efektif, Total Akrual, Pergantian Direksi, dan Frekuensi Kemunculan Foto CEO terhadap Kecurangan pelaporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis tentang Target Keuangan, Pengawasan Tidak Efektif, Total Akrual, Pergantian Direksi, dan Frekuensi Kemunculan Foto CEO terhadap Kecurangan pelaporan keuangan dan dapat dijadikan perbandingan antara teori yang dipahami pada perkuliahan dengan prakteknya.

2. Bagi Emiten

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja keuangan perbankan yang akan datang agar dapat memahami faktor-faktor

yang mempengaruhi kecurangan pelaporan keuangan berdasarkan teori *fraud pentagon*. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pihak manajemen dan regulator untuk meningkatkan pengawasan, mengidentifikasi risiko kecurangan, dan menerapkan langkah-langkah preventif yang lebih efektif, sehingga kinerja pelaporan keuangan dapat ditingkatkan dan transparansi keuangan perusahaan dapat terjaga.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada perusahaan perbankan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan diperoleh dari www.idx.co.id dan melalui website resmi masing masing perbankan untuk mengambil data berupa laporan tahunan selama kurun waktu 2016-2023.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan dari bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Juli 2025. Dengan rincian kegiatan penelitian seperti pada lampiran.